BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Seri E Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Seri E Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa.
15. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Penghapusan barang milik desa meliputi penghapusan dari daftar kekayaan desa.
21. Pemindahtanganan kekayaan desa adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
   a. tanah desa;
   b. bangunan desa; dan
   c. lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/ Daerah;
   b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
   c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
   d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
   g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
   h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
   a. pembelian;
   b. sumbangan;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; atau
d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

BAB III
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Azas dan Tujuan

Pasal 4

(1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 5

(1) Hasil penerimaan pengelolaan kekayaan milik desa harus disetorkan ke rekening kas desa.
(2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
(3) Biaya pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan desa;
   b. menetapkan status penggunaan, dan pemanfaatan atau pemindahtanganan kekayaan desa;
   c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa;
   d. mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
   e. menyetujui usul pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah dan/ atau bangunan, barang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa adalah perangkat desa, terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(4) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana kebijakan pengelolaan kekayaan desa atau barang milik desa;
   b. melaksanakan kebijakan pengelolaan kekayaan desa atau barang milik desa;
   c. mengkoordinir pencatatan dan inventarisasi kekayaan desa atau barang milik desa.
   d. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa atau barang milik desa yang ada pada Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa;
   e. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan dan pemeliharaan kekayaan desa atau barang milik Desa serta laporan semesteran dan tahunan;

f. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan desa atau barang milik Desa.

(5) Perangkat desa lainnya selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa berwenang dan bertanggung jawab :
a. mengajukan rencana kebutuhan kekayaan desa kepada Kepala Desa melalui koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi kekayaan desa atau barang milik desa yang berada dalam penguasaannya;
c. menggunakan, mengamankan dan memelihara kekayaan desa atau barang milik desa yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
d. membuat laporan barang secara berkala berupa semesteran dan tahunan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik desa meliputi :
a. Perencanaan;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan dan pemanfaatan;
d. Pengamanan dan pemeliharaan;
e. Penatausahaan;
f. Penghapusan;
g. Pemindah tanganan;
h. Penilaian;
i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDes setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan barang milik desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Paragraf 3
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 11

(1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
(2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Jenis pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa :
a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa dilakukan atas dasar :
   a. menguntungkan Desa;
   b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
(2) Kriteria menguntungkan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. hasil sewa lebih besar daripada dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa;
   b. tarif sewa minimal sama dengan harga sewa yang berlaku di daerah setempat.
(3) Apabila jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b lebih dari 1 tahun, maka besaran tarif setiap tahun naik dan pembayaran dilakukan setiap tahun yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.

Pasal 14

(1) Sewa-menyewa terhadap kekayaan desa dilakukan melalui perjanjian sewa-menyewa.
(2) Besarnya tarif sewa selain tanah dan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Surat perjanjian sewa menyewa, sekurang-kurangnya memuat :
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. obyek perjanjian sewa menyewa;
   c. besaran dan jangka waktu sewa menyewa;
   d. tata cara pembayaran sewa menyewa;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. penyelesaian perselisihan;
   g. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure)*; dan
   h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
(4) Surat Perjanjian sewa-menyewa berupa tanah dan bangunan harus dengan persetujuan BPD.

Pasal 15

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya.
(2) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kecuali terhadap tanah dan bangunan.
(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. obyek perjanjian;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure)*; dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan dilakukan atas dasar :
   a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
   b. meningkatkan penerimaan/ pendapatan desa.

(2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dan pihak kedua.
(3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan kekayaan desa;
   b. dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
   c. tidak diperbolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
   d. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
(4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. obyek perjanjian;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure)*; dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar :
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
b. Tidak tersedia dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Pasal 18

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

(1) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(2) 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk tim untuk melakukan evaluasi bangunan yang akan diserahkan.

Pasal 20

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek perjanjian;
c. jangka waktu;
d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
e. hak dan kewajiban para pihak ;
f. penyelesaian perselisihan;
g. keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure)*; dan
h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

(1) Untuk memperoleh izin Bupati dalam pelaksanaan pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah, Kepala Desa mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
   a. Peraturan Desa;
   b. Berita acara hasil sosialisasi rencana pemanfaatan kekayaan desa dan persetujuan tertulis dari warga sekitar;
   c. Draf Perjanjian kerjasama; dan
   d. Analisa biaya dan manfaat sosial.
(2) Berdasarkan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerjasama ditandatangani dan dilaksanakan.

Paragraf 4
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 22

(1) Kekayaan desa berupa tanah dipasang patok tanda batas dan papan nama.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya menyebutkan :
   a. Tanah milik Pemerintah Desa yang bersangkutan;
   b. Luas;
   c. Peruntukan;
   d. Alas hak dan dasar hukum.

Pasal 23

(1) Perangkat desa lainnya selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan kekayaan desa atau barang milik desa yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada rencana kebutuhan dan pemeliharaan kekayaan desa atau barang milik Desa.
(3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

Paragraf 5
Penatausahaan

Pasal 24

(1) Jenis dan rincian kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. rincian kekayaan yang dimiliki Desa, meliputi jenis/ nama kekayaan desa, letak, luas, jumlah bidang, alas hak dan keterangan perolehan;
   b. penanggung jawab pengelolaan;
   c. hasil pengelolaan atau pemanfaatan.

Pasal 25

(1) Kekayaan desa berupa tanah dicatatkan dalam Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.
(2) Buku Data Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai format dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Kekayaan desa berupa bangunan dan/ atau barang dicatatkan dalam Buku Data Inventaris Desa.
(2) Buku Data Inventaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai format sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Kekayaan desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
(2) Dalam rangka pengamanan dan pengawasan serta guna melindungi kekayaan desa berupa tanah, dokumen asli bukti kepemilikan hak atas tanah dapat disimpan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang membidangi kekayaan desa.
(3) Biaya pembuatan bukti kepemilikan hak bersumber dari APBDes dan atau berdasarkan kesepakatan/ perjanjian dengan pihak lain.

Paragraf 6
Penghapusan

Pasal 28

(1) Penghapusan kekayaan desa dilakukan dalam hal kekayaan desa dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
(3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk tanah dan/ atau bangunan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam hal kekayaan desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 30

(1) Penghapusan kekayaan desa dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud:
    a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
    b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa.
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan kekayaan desa.

Paragraf 7
Pemindahtanganan

Pasal 31

Bentuk-bentuk pemindahtanganan kekayaan desa sebagai tidak lanjut atas penghapusan barang milik desa meliputi :
a. penjualan;
b. tukar menukar; dan
c. hibah.

Pasal 32

(1) Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan hanya dapat dilakukan terhadap kekayaan desa selain tanah dan bangunan.
(2) Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan :
    a. untuk optimalisasi kekayaan desa yang berlebih atau idle;
    b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi desa apabila dijual; dan
    c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
(2) Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan dilaporkan kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) atau sejak dilaksanakannya penjualan.

Pasal 34

Hasil pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan merupakan penerimaan desa dan harus disetorkan ke rekening kas desa.

Pasal 35

Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Pemerintah Desa mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk penjualan kepada BPD, yang disertai alasan dan pertimbangan pemindahtanganan;
b. BPD membahas usulan penjualan sebagaimana dimaksud huruf a dan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan tersebut;
c. Hasil pembahasan BPD sebagaimana dimaksud huruf b dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD;
d. Apabila BPD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemindahtanganan kekayaan desa.

Pasal 36

Tukar menukar merupakan pemindahtanganan kekayaan desa dengan menerima penggantian dalam bentuk barang yang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

Pasal 37

Pemindahtanganan kekayaan desa dalam bentuk tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan;
b. untuk optimalisasi kekayaan desa;
c. tidak tersedia dana dalam APBDes; atau
d. terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 38

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
(6) Biaya peralihan hak atas tanah pengganti menjadi atas nama pemerintah desa merupakan tanggung jawab penuh dari pemohon.
(7) Mekanisme pembayaran dan penggunaan ganti rugi atas tanah desa mengacu pada pedoman umum pelaksanaan pembayaran dan penggunaan uang ganti rugi yang ditetapkan Bupati.

Pasal 39

(1) Hibah kekayaan desa dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. bukan merupakan barang rahasia negara/ daerah/ desa;
    b. bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 40

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Paragraf 8
Penilaian

Pasal 41

Penilaian terhadap kekayaan desa dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik desa.

Pasal 42

(1) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
(2) Penilaian kekayaan desa berupa tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 9
Pengawasan, Pembinaaan, dan Pengendalian

Pasal 43

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh BPD sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Desa wajib memprogramkan pensertifikatan tanah desa menjadi atas nama desa dengan sumber pendanaan dari APBDes secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, proses pengelolaan dan/ atau pemanfaatan kekayaan desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa memiliki kekayaan desa yang potensinya dapat dimanfaatkan bersama untuk membangun desa apabila dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan kekayaan desa dengan berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan pendapatan desa. Dalam hal ini perlu kiranya dilakukan pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemafaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Yang dimaksud tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogodesa, tanah bondodesa dan sebagainya.

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Barang-barang yang diperoleh Desa harus disertai dokumen berupa serah terima barang dan masuk dalam daftar inventarisasi kekayaan desa.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Azas fungsional dimaksudkan bahwa setiap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
Azas kepastian hukum dimaksudkan bahwa pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Azas keterbukaan dimasudkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa harus terbuka/transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
Azas efesiensi dimaksudkan bahwa pengelolaan kekayaan desa diarahkan agar kekayaan desa digunakan sesuai batasan-batasan standart kebutuhgan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa secara optimal.
Azas akuntabilitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengelolaan kekayaan milik desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
Azas kepastian nilai dimaksudkan bahwa pengelolaan kekayaan desa harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai kekayaan desa.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penetapan status penggunaan adalah penetapan fungsi dan peruntukan kekayaan desa. Contoh :
1. tanah desa berupa sawah terletak di blok A letter C nomor 01 digunakan sebagai tanah kas desa;
2. tanah desa berupa pekarangan terletak di Dusun X Desa Y SHM nomor 007 digunakan untuk lapangan olahraga.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk juga dalam hal perubahannya.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila tim evaluasi menilai bangunan yang akan diserahkan tidak layak secara teknis, kepala desa menyampaikan kepada pihak ketiga agar memperbaikinya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa adalah berupa sertifikat untuk tanah. Sedangkan dokumen kepemilikan untuk kekayaan desa selain tanah dapat berupa surat perjanjian, berita acara serah terima dan bukti tertulis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan adalah terhadap kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, bencana alam atau/ kejadian alam lainnya, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

- Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

- Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, antar pemerintah desa, pemerintah desa dengan pemerintah pusat, atau antara pemerintah desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah desa kepada pemerintah pusat, pemerintah desa kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah desa kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud pembangunan untuk kepentingan umum adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti rugi berupa uang dimasukkan dalam rekening pemerintah desa dan pembelian tanah pengganti dapat dilakukan oleh pemerintah desa bersangkutan setelah menerima ganti rugi.

Apabila terdapat sisa uang ganti rugi setelah dibelikan tanah pengganti, maka uang ganti rugi dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Ayat (3)

Tanah lain yang lebih baik merupakan tanah pengganti tanah desa yang harus memenuhi kriteria :

a. lebih subur atau lebih produktif dari tanah yang dilepas apabila tanah yang dilepas berupa tanah pertanian
b. lebih luas atau sekurang-kurangnya sama dengan tanah yang dilepas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 54 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

MODEL A-3

BUKU DATA INVENTARIS DESA .....
TAHUN .....

NO	Jenis barang bangunan	Asal Barang/ Bangunan					Keadaaan Barang/ Bangunan Awal Tahun		Tanggal Penghapusan				Keadaan Barang/ Bangunan Akhir Tahun		Ket.
		Dibeli Sendiri	Bantuan			Sumbangan	Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Tanggal penghapusan	Baik	Rusak	
			Pemerintah	Propinsi	Kab/Kota										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. 2. dst															

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

DESA PERCONTOHAN, Tanggal-Bulan-Tahun
SEKRETARIS DESA PERCONTOHAN

Keterangan Cara Pengisian : Buku Data Inventaris Desa (Model A.3)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis kekayaan dan Inventaris milik Pemdes

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/ bangunan, diisi dengan nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan Inventaris Desa

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Desa

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Propinsi

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari sumbangan

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena rusak

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena dijual

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena disumbangkan

Kolom 13 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penghapusan

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik

Kolom 15 : Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak

Kolom 16 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

MODEL A-5

BUKU DATA TANAH MILIK DESA/TANAH KAS DESA
TAHUN .....

No.	Asal Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa	Nomor Sertifikat Buku Letter C /Persil	Luas (Ha)	KELAS	Perolehan TKD					Jenis TKD					Patok Tanda Batas		Papan Nama		Lokasi	Perun-tukan	Ket
					Asli Milik Desa	Bantuan			Lain Lain	Tgl PEROLEHAN	SAWAH	TEGALAN	KEBUN	TAMBAK / KOLAM	Tanah Kering / Darat	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada			
						PEMERINTAH	PROPINSI	KAB/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						
2																						

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

DESA PERCONTOHAN, Tanggal-Bulan-Tahun
SEKRETARIS DESA PERCONTOHAN

Keterangan Cara Pengisian : Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah kas Desa (Model A.5)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/ didata/ dibukukan
Kolom 2 : Diisi dengan asal tanah milik desa/ tanah kas desa, misalnya: ganjaran/bengkok, titisara, cawisan, peguran, pangonan dan lain sebagainya
Kolom 3 : Diisi dengan nomor sertifikat/ buku leter c/ persil
Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah desa/ tanah kas desa dalam hektar (ha)
Kolom 5 : Diisi kelas tanah misalnya S1, D1 dan sebagainya.
Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang diperolehnya dibeli atas biaya Pemerintah Desa
Kolom 7 : Diisi dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah
Kolom 8 : Diisi dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Propinsi
Kolom 9 : Diisi dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Kabupaten
Kolom 10 : Diisi dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan lainnya
Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun perolehan tanah
Kolom 12 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis sawah
Kolom 13 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tegalan
Kolom 14 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis kebun
Kolom 15 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tambak/kolam
Kolom 16 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tanah kering darat
Kolom 17 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada patok tanda batas
Kolom 18 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada patok tanda batas
Kolom 19 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada papan nama
Kolom 20 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada papan nama
Kolom 21 : Diisi dengan nama lokasi tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 22 : Diisi sesuai peruntukan/ pemanfaatan tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 23 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH